

WARTA

Rakor PMK, Ketua Satgas Nasional Sarankan NTB Percepat Vaksinasi Tuntaskan Wabah

Syafruddin Adi - NTB.WARTA.CO.ID

Jul 16, 2022 - 12:41



Mataram NTB - Untuk mempercepat penanganan kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak sapi, kerbau dan kambing di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Ketua Satgas Nasional menyarankan, untuk mempercepat vaksinasi dan pengobatan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Satgas Nasional, Letjen Suharyanto pada Rapat koordinasi penanganan wabah PMK provinsi NTB dengan Satgas Provinsi dan Satgas Kabupaten/kota secara virtual, Kamis (14/07/2022) di ruang rapat Sekda NTB.

Lebih lanjut, jelasnya bahwa logistik akan terus didatangkan dari pusat. Sedangkan untuk tenaga vaksinasi TNI/Polri, dapat diperbantukan terlebih dahulu, dan dilakukan pelatihan.

"Pada kasus PMK, ternak yang mati diusulkan untuk dilakukan penggantian," jelas Letjen Suharyanto, yang memimpin rapat tersebut.

Ditambahkan Kepala BNPB ini bahwa ada beberapa langkah utama dan cukup strategis yang dapat dilakukan dalam penanganan PMK oleh Satgas, diantaranya dilakukan Biosecurity, pengobatan, vaksinasi, pemotongan hewan bersyarat dan testing.

"Sehingga dapat memutus dan meminimalisir penularan penyakit ini," ujarnya.

Sementara disampaikan, bahwa ada beberapa langkah kegiatan penanggulangan PMK yang telah dilakukan di NTB, diantaranya, melaksanakan pemeriksaan dipintu masuk dan keluar bandara/ pelabuhan.

Selanjutnya melakukan penyemprotan dipintu keluar masuk pelabuhan Lembar dan Poto Tano. Melakukan penyuntikan vaksin, mencegah keluar masuk ternak selama darurat PMK, melaksanakan pengecekan kondisi ternak di wilayah dan melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan wilayah.

Sementara itu, pada kesempatan tersebut Ka Satgas Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas bantuan pusat kepada Provinsi NTB.

"Terimakasih, sinergi dan kolaborasi menjadi kunci menurunkan kasus PMK pada ternak Sapi, Kerbau dan Kambing, terutama 5 Kabupaten/Kota di pulau Lombok NTB," kata Sekda NTB ini.

Diakuinya, sebaran PMK di NTB, terdiri dari dua kategori wilayah, yaitu daerah wabah ada 4 Kabupaten, 37 kecamatan dan 424 desa dan kelurahan. Sedangkan daerah tertular ada 1 kota, 6 kecamatan dan 19 kelurahan.

Perkembangan PMK di pulau Lombok, hingga tanggal 13 Juli 2022 berdasarkan data, ada 950.551 ekor populasi hewan rentan PMK yang terdiri dari sapi, kerbau, kambing, domba dan babi. Dari angka tersebut, jumlah kasus sebanyak 75.487 ekor, yang sakit sebanyak 14.839 ekor dan sembuh 60.289 ekor.

Sekda yang juga selaku ketua Satgas Penanganan PMK Prov. NTB, menjelaskan bahwa setelah dilakukan penanganan dengan pengobatan ternak sakit, isolasi ternak, desinfeksi kandang, dan diberikan vaksin, maka ternak sapi yang terinfeksi PMK kesembuhan semakin meningkat.

"Sehingga ternak sapi yang sakit semakin menurun, ini terjadi di semua

Kabupaten,” jelas Miq Gite sapaan Sekda.

Serapan vaksin ternak juga telah dilaksanakan di 5 Kabupaten/Kota di Provinsi NTB. Namun, kebutuhan vaksin untuk ternak masih kurang, oleh sebab telah dilakukan pengajuan alokasi vaksin yang akan segera dikirim oleh pemerintah pusat.

Untuk kebutuhan vaksin yang diterima sebanyak 5.000 Dosis, terdiri dari jenis Vaksin Aftopor dan telah disuntikan sebanyak 4.008 Dosis. Sehingga sisanya masih ada 992 Dosis. Kemudian tambahan alokasi vaksin ada 38.000 Dosis. Sedangkan kebutuhan vaksin sebanyak 418.721 Dosis untuk Sapi dan Kerbau.

“Target akhir kami, Provinsi NTB harus bebas PMK,”kata mantan Kadis Penanaman Modal dan PTSP Prov. NTB (Adb)